

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah merupakan entitas publik yang harus mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif dan transparan. Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Husna, 2013).

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah kepada rakyat, atas pengelolaan dana publik dari pajak,

retribusi atau transaksi lainnya. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Laporan keuangan juga media bagi sebuah entitas pemerintah, definisi laporan keuangan daerah menurut Mahmudi (2016:8) ”laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik”.

Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan diharapkan benar-benar harus berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai untuk kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dalam hal ini pemerintah dapat untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangan kepada publik. Pemerintah juga harus bisa menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Karena, dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penyusunan laporan keuangan pada sektor publik telah mengalami perubahan, yaitu perubahan sistem akuntansi yang digunakan dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Pada PP No. 71 tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014,

hal ini berarti pada tahun 2015 pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah harus menerapkan standar akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntansi Berbasis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Penggunaan akuntansi basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Ihsanti (2014) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan ( Wati dkk,2014)

Selain sumber daya manusia, faktor yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tingkat dan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang efektif dan efisien. Dan dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objek tertentu, dan menjaga kekayaan organisasi.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Menurut Mulyadi menyebutkan bahwa “sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen”. Pengendalian intern mempunyai peranan yang penting dalam kualitas laporan keuangan. Maka tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian intern yang dimiliki institusi pemerintah daerah.

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.

Pemerintah Indonesia memiliki peraturan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesianomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) peraturan ini mengadopsi model *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) sistem pengendalian merupakan proses kegiatan yang dilakukan didalam entitas ( organisasi, termasuk perusahaan), dipengarui oleh dewan komisaris ( atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya. Adapun kerangka SPIP dalam PP 60/2008 antara lain, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah harus berpedoman pada SPIP.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ( Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimanakah pengaruh implementasi akuntansi akrual terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern, dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubung dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia,

sisitem pengendalian intern, dan implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan hasil ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini diharap mampu membuka kemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan sejenis.

##### **2. Manfaat praktis**

Sebagai bahan masukan dalam masalah kinerja keuangan serta sebagainya saran dalam mengambil keputusan.

##### **3. Manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya**

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

#### **1.5 Batasan Masalah dan Orginalitas**

##### **1.5.1 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar penelitian ini terarah, terfokus dan tidak meluas karna mengingat luasnya masalah yang akan diteliti maka penulis membatasi masalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intrern, implementasi akuntansi akrual terhadap kualitas laporan daerah pada seluruh OPD Kabupaten Rokan Hulu.

### **1.5.2 Originalitas**

Penelitian ini merupakan replika penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wijayanti (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Akuntansi AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Studi empiris tahun sebelumnya pemerintah Kabupaten Madiun, sedangkan pada penelitian ini studi empiris pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Variabel Independen pada penelitian sebelumnya Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Akuntansi AkruaI, sedangkan pada penelitian ini variable independen iyalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Interen, Implementasi Akuntansi AkruaI.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

### **BAB IV: HASILDAN PEMBAHASAN**

Bab ini menelskan tentang deskripsi hasil, penguian hipotesis dan pembahasan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kopetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Hanaffi (2017), Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Menjelaskan bahwa kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A Tahun 2003 didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil

tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Dengan adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Karna Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Manusia bertanggungjawab untuk mengelola organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Hullah, et al: 2012).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Menurut Ihsanti (2014), Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan output dan outcomes. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika

akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diterapkan pemerintah.

Sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Sumber daya manusia dituntut untuk menjadi sumber daya yang kompeten. Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal pelaporan keuangan, sumber daya manusia yang tidak kompeten dapat berakibat pada kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam menerapkan logika akuntansi.

### **2.1.2 Langkah-langkah Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Uha (2014:131) mengemukakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan formal PNS menuju pengembangan pembangunan dan membangun wawasan keilmuan.
2. Mengoptimalkan diklat dan peningkatan bintek untuk mewujudkan kompetensi dan ketrampilan teknis.
3. Penyusunan standar kompetensi jabatan dalam menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

4. Pembinaan karier PNS yang terstruktur dan professional dengan pola pikir secara umum dan kerja secara spesial dalam riil produksi.
5. Pengembangan jabatan fungsional menuju spesialisasi dengan kebutuhan tuntutan kerja.

### **2.1.3 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014:53) terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, adalah sebagai berikut:

1. Motif (*motive*), adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif akan mendorong, mengarahkan perilaku, terhadap tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat (*traits*), adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*self-concept*), adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai yang dijunjung tinggi seseorang serta suatu sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan atau kehidupannya.
4. Pengetahuan (*knowledge*), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Sumber-sumber pengetahuan diperoleh dari hasil telaah (*study, learning*) dan pengalaman (*experience*) serta intuisi (*intuition*). Pengetahuan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu melalui belajar. Belajar adalah mengaitkan secara

bersama-sama antara data dengan informasi, pengalaman, dan sikap yang dimiliki seseorang.

5. Keterampilan (*skill*), adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi, pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh mengorganisasi data dan rencana) dan pemikiran konseptual.

#### **2.1.4 Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh pegawai yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai, bukan jaminan absolut karena sangat sulit untuk membangun sistem yang sempurna.

Menurut Mulyadi (2014:163), sistem pengendalian intern adalah “ Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen.

Romney dan Steibart (2012:23), mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses karena termasuk didalam aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan pengelolaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu pedoman yang dirancang

untuk memberikan jaminan atas keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi.

Sistem pengendalian Internal memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Melindungi aset negara baik secara fisik maupun data.
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal.
4. Membarikan jaminan memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.5 Prinsip – prinsip sistem Pengendalian Intern**

Menurut Levany (2011:23) untuk dapat mencapa tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi:

#### **a. Pemisahan Fungsi**

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidak beresan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisien tugas.

#### **b. Prosedur pemberian wewenang**

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.

c. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi yang sangat penting untuk mencapai sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen member dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

d. Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang diteliti secara cepat dan tepat serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu.

e. Pengawasan fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

f. Pemeriksaan intern secara bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada.

### **2.1.6 Komponen-komponen Pengendalian Intern**

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:71) sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik.

2. Penaksiran Risiko.

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat

mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar.

3. Aktivitas Pengendalian.

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.

4. Informasi dan Komunikasi.

Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini:

- a. Bagaimana transaksi diawali.
- b. Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer.
- c. Bagaimana fail data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui.
- d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
- e. Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
- f. Bagaimana transaksi berhasil.

5. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan. Berbagai bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini:

- a. Supervisi yang efektif, yaitu manajemen yang lebih atas dapat mengawasi manajemen dan karyawan di bawahnya.
- b. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing-masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan oleh perusahaan.
- c. Audit internal yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan.

### **2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan (Mahmudi, 2013).

Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Bastian (2010:9) laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Sementara Menurut Mulyadi (2010:96) mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

### **2.1.8 Tujuan Laporan Keuangan**

Adapun tujuan laporan keuangan menurut peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara spesifik sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan, informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya”.

### **2.1.9 Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut Azhar (2013: 14) laporan yang berkualitas adalah laporan yang mempunyai keakurasian, dan kesesuaian dengan kebutuhan manajemen dan kelengkapan dari laporan yang dihasilkan, maka kualitas laporan keuangan terdapat tiga indikator yaitu:

1. Pengungkapan Cukup (*adequate*)

Pengungkapan yang cukup mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

2. Pengungkapan Wajar (*fair*)

Wajar merupakan pengungkapan informasi agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi pemakai laporan keuangan.

3. Pengungkapan lengkap (*full*)

Pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya menyajikan semua informasi yang relevan.

Menurut Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1) Relevan

Laporan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
- c) Tepat waktu.
- d) Lengkap.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a) Penyajian jujur.
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*).

c) Netralitas.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Hanafi (2010:16) kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan delapan indikator, yaitu:

- 1). Manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan.
- 2). Ketepatan pelaporan laporan keuangan.
- 3). Kelengkapan informasi yang disajikan.
- 4). Penyajian secara jujur.
- 5). Isi laporan keuangan dapat diverifikasi.
- 6). Keakurat informasi yang disajikan.
- 7). Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- 8). Kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan.

#### **2.1.10 Akuntansi Basis Akrua**

Pemerintah Indonesia menerapkan Basis Akuntansi Akrua karena basis ini memiliki manfaat yaitu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Kemenkeu, 2014). Selanjutnya kajian dari *European Commission tentang Modernizing The EU Accounts* yang dikutip Kemenkeu, 2014 menjelaskan bahwa manfaat dari Akuntansi Berbasis Akrua adalah pengambilan keputusan yang efektif karena telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, audit yang efektif karena akuntansi akrua menyediakan catatan yang jelas dan koheren, meningkatkan pengendalian politik (*political control*) melalui pemahaman yang lebih baik atas dampak informasi keuangan terhadap kebijakan, dan meminimalisasi risiko kesalahan dalam pembayaran.

Lubis (2017:18), "basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan".

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

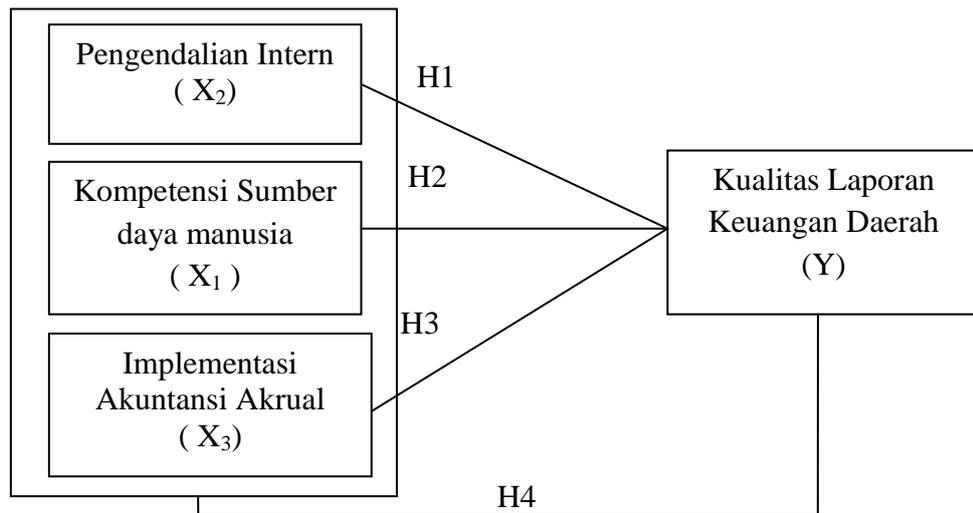
## 2.2 Penelitian Yang Relevan

NO	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1	Ratna Wijayanti (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Akuntansi Akruwal Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan Daerah. ( Studi pada pemerintah kabupaten madiun)	Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Akuntansi Akruwal Dependen: Kualitas Laporan Keuangan.	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2	Ida (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern,	Independen : Sumberdaya Manusia, Pengendalian Intern, Pemahaman	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem

		Pemahaman Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Berbasis AkruaDependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Pengendalian Intern, Pemahaman Berbasis Akrua berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah .
3	Emy Pavitasari(2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia , Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Independen : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal. Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran.

Untuk lebih jelasnya penelitian ini dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut:



**Gambar 2.1**  
**Keranga Pemikiran**

### 2.4 Hipotesis

- H1 : Diduga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.
- H2 : Diduga sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H3 : Diduga Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif Terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- H4 : Diduga kompetensi Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, implementasi akuntansi akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Dalam penulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011).

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2014:80) mengatakan Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 29 OPD. Dari total OPD yang berjumlah 29 OPD, masing-masing OPD diambil satu orang kepala bagian dan satu orang staf bagian akuntansi keuangan yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan

OPD sehingga dari tiap-tiap OPD diambil 2 orang responden. Total responden dalam penelitian ini adalah 58 orang.

### 3.3.2 Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2014:85) *purpose sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti. Penentuan jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.1**  
**Penentuan Jumlah Sampel Penelitian**

No	Nama OPD ( Organisasi Perangkat Daerah)	Kode
1	Sekretariat Daerah	2
2	Sekretariat DPRD	2
3	Inspektorat	2
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2
7	Badan Pendapatan Daerah	2
8	Badan Kesatuan Bangsa dan	2
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2
11	Dinas Kesehatan	2
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2
15	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	2
16	Dinas Peternakan dan Perkebunan	2
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2
18	Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	2

	PemerintahanDesa	
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2
23	Dinas Lingkungan Hidup	2
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
26	Dinas Perhubungan	2
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip	2
28	Dinas Komunikasi dan Informasi	2
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2021

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari data angka dan masih perlu dianalisis kembali.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang dipilih melalui pertanyaan yang diajukan berupa kuesioner oleh peneliti kepada kepala bagian keuangan dan staf sub bagian akuntansi/staf keuangan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:137) Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi keuangan. Jenis kuesioner yang penulis

gunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang disediakan jawabannya.

Adapun alasan penulis menggunakan kuesioner tertutup adalah:

1. Kuesioner tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban.
2. Kuesioner tertutup lebih praktis.
3. Keterbatasan waktu penelitian.

Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari kuesioner yang diajukan kepada responden tersebut, pengukuran yang digunakan adalah skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima. Untuk pernyataan positif alternative jawaban, sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Kurang Setuju (KS) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Sumber: Sugiyono, 2014

### 3.6 Variable Penelitian Dan Defenisi Operasional

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2014:21) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan judul peneliti maka terdapat lima variabel yang akan diteliti, variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variable Independen ( variable bebas ) terdiri dari :
  - a. Kompetensi Sumber Daya Manusia
    - a. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Indikator dalam variabel ini, yaitu : (1) Pengetahuan (*knoeledge*), (2) Keterampilan (*skill*), (3) Sikap (*attitude*). Skala pengukuran menggunakan lima skala yaitu: SS (sangat setuju), S (setuju), KS (kurang setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju).
  - b. Sistem Pengendalian Interen
    - b. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator dalam variable ini yaitu : (1)Lingkungan Pengendalian, (2)Penaksiran Resiko, (3)Aktivitas Pengendalian, (4)Informasi dan Komunikasi serta pemantauan. Skala pengukuran menggunakan lima skala yaitu: SS (sangat setuju), S (setuju), KS (kurang setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju).

c. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

- c. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah basis akrua, untuk mengakui pendapatan, beban, aset kewajiban, dan ekuitas. Basis akrua untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Indikator dalam variable ini yaitu: (1)Pengakuan; (2)Pengukuran; (3)Pengungkapan. Skala pengukuran menggunakan lima skala yaitu: SS (sangat setuju), S (setuju), KS (kurang setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju).

2. Variabel Dependen ( Variabel Terikat ) terdiri dari ini

a. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

- d. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Indikator dalam variable ini yaitu : (1)Relevan; (2)Andal; (3)Dapat dibandingkan; dan (4)Dapat dipahami. Skala pengukuran menggunakan lima skala yaitu: SS (sangat setuju), S (setuju), KS (kurang setuju), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju).

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

#### **3.7.1 Uji Kualitas Data**

Menurut Sugiyono (2012:133) Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

#### **3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah terkait analisis regresi linear antara dua variabel atau lebih. Dimana satu variabel sebagai variabel dependen (terikat) dan lainnya sebagai variabel independen (bebas) Kurniawan (2011:340). Rumus regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana :

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
- a = Nilai konstanta, yaitu besarnya Y bila  $X = 0$
- b = Koefisien regresi dari variable bebas
- $X_1$  = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- $X_2$  = Pengendalian Interen
- $X_3$  = Implementasi Akuntansi Akruial

### **3.7.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variable independen dalam menerangkan variasi variable dependen atau tidak bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas.

### **3.7.4 Uji Signifikan Secara Parsial (Uji-t)**

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya (X) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya (Y). Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing  $t_{hitung}$ . Dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat ditentukan apakah  $H_0$  diterima atau  $H_0$  ditolak.

Jika hasil penelitian menunjukkan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (Riduwan:2013).

### **1.7.8 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji-F)**

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang dibuat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

Jika hasil penelitian menunjukkan  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sedangkan jika hasil penelitian menunjukkan  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  pada taraf signifikan 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (Riduwan:2013).